

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Olahraga saat ini telah menjadi alat bagi suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya dan juga merupakan salah satu kekuatan politik di dunia internasional.¹ Pada awalnya olahraga adalah sebuah aktivitas manusia yang membutuhkan kemampuan dan keberanian (*skill and powerness*) yang kemudian seiring berjalannya waktu olahraga semakin berkembang dengan adanya ajang kompetisi atletik sebagai tempat untuk berunjuk ketrampilan yang dimiliki.² Meningkatnya pengaruh olahraga menjadikan hal ini sebagai suatu isu yang penting dibahas dalam Hubungan Internasional. Nelson Mandela mengatakan bahwa olahraga merupakan cara komunikasi yang paling efektif dalam dunia modern, baik melalui komunikasi lisan maupun tulisan dan memengaruhi secara langsung terhdap miliaran orang di seluruh dunia. Tidak ada keraguan bahwa olahraga merupakan sarana yang bagus dan cara yang baik untuk membangun persahabatan antar bangsa.³

Saat ini olahraga adalah suatu bisnis yang sangat penting dalam industri hiburan global, sebagai contoh penyelenggaraan *FIFA World Cup* dan *Olympic Games* (Olimpiade) adalah kegiatan yang paling banyak ditonton di seluruh dunia.⁴

¹ Alison Lincoln, "The Global Politic of Sport : The Role of Global Institutions in Sport", (2005): 5.

² Alison Lincoln, 5.

³ Jhon Theis Eden "Major Research Paper: Soccer and International Relations," University of Ottawa (2013): 7.

⁴ Roger Levermore and Adrian Budd "Sport and International Relations an Emarging Relationship," University of Liverpool. (2004): 10.

Salah satu turnamen multi-cabang olahraga internasional yang sudah dilaksanakan dari tahun 1896 adalah Olimpiade.⁵ Olimpiade merupakan sebuah ajang kompetisi olahraga bertaraf internasional yang memiliki partisipan negara terbanyak. Lebih dari dua ratus negara yang ada di dunia mengikuti ajang kompetisi tersebut.⁶ Penyelenggaraan Olimpiade dilakukan oleh salah satu organisasi internasional yaitu *International Olympic Committee* (IOC). IOC bertanggungjawab dalam pemilihan negara penyelenggara, memperbaharui dan menyetujui program olahraga apa saja yang akan diselenggarakan dan kemudian melakukan negosiasi *sponsorship*, lalu mengatur penyiaran selama olimpiade berlangsung.⁷ Hingga sekarang sudah sebanyak 42 kota dan 23 negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade.⁸

Dalam kompetisi olahraga multi-cabang seperti Olimpiade, kesuksesan didapat oleh sebuah negara ketika mampu menjadi tuan rumah sekaligus mampu menjadi juara umum. Sukses menjadi tuan rumah dapat mempertegas citra kemajuan suatu negara karena untuk mengorganisir pertandingan tersebut diperlukan kesiapan diberbagai bidang seperti kesiapan dana, infrastruktur, sarana olahraga dan pengorganisasian yang baik, dengan suksesnya sebuah negara menjadi juara umum dalam ajang tersebut dapat meningkatkan citra negara penyelenggara. Seperti yang dikemukakan oleh Victor D. Cha yang mengatakan bahwa di Asia Timur olahraga telah menjadi salah satu jalur untuk menunjukkan pembangunan di negara-negara Asia. Semua negara besar dan berkembang bersaing menjadi tuan rumah ajang

⁵ Roger Levermore and Adrian Budd, 10.

⁶ Roger Levermore and Adrian Budd, 11.

⁷ Roger Levermore and Adrian Budd, 11.

⁸ Olympic, "Welcome to Ancient Olympic Games," <https://www.olympic.org/ancient-olympic-games>, diakses 22 Januari 2019.

olahraga untuk mengekspresikan kesiapan mereka di level global. Penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional dapat memberikan negara tuan rumah ruang untuk menaikkan profil mereka dan memberikan pesan dan citra kepada komunitas internasional.⁹ Kegunaan even olahraga sebagai *soft power* lebih cenderung dipromosikan untuk tujuan utama yaitu ekonomi, kemudian barulah tujuan pembangunan nasional dan konsolidasi politik. Seperti yang dilakukan oleh Jepang ketika menjadi penyelenggara Olimpiade pada tahun 1964 di Tokyo.¹⁰ Penyelenggaraan Olimpiade ke-18 ini merupakan peristiwa yang bersejarah bagi Jepang, hal ini dikarenakan dengan penyelenggaraan even tersebut menandakan akhir periode rekonstruksi pasca perang yang menyebabkan perbaikan citra Jepang di mata dunia dan juga pertumbuhan ekonomi Jepang melesat tinggi. Hal ini menandakan bahwa Jepang merupakan negara Asia pertama yang menjadi negara penyelenggara Olimpiade. Jepang berupaya sedemikian rupa untuk menjadi negara penyelenggara Olimpiade 1964 agar komunitas global memandang negaranya sebagai negara yang modern dan maju setelah Perang Dunia II.¹¹

Jepang merupakan salah satu negara Asia yang aktif dalam ajang Olimpiade. Hal tersebut dapat dilihat dengan bergabungnya Jepang sebagai negara Asia pertama yang turut bertanding di ajang Olimpiade kelima yang dilaksanakan di Stockholm pada tahun 1912. Sejak saat itu, Jepang selalu mengirimkan atlet-atlet terbaiknya

⁹ Suzanne Dowse, "Power Play: International Politics, Germany, South Africa and the FIFA World Cup," South African Institute of International Affairs Occasional Paper No.82, (2011): 5-14.

¹⁰ Japan Fact Sheet, "Japan and the Olympics – Asia's First Olympic Host," <https://web-japan.org/factsheet/en/pdf/18Olympics.pdf>, diakses 25 Januari 2019.

¹¹ Nancy K. Rivenburgh, "The Olympic Games Media and the Challenges of Global Images Making," University of Washington Seattle, (2004): 1.

untuk mengikuti pertandingan Olimpiade hingga pada tahun 1940 untuk kali pertama Tokyo dipromosikan untuk menjadi kota penyelenggara Olimpiade, namun hal tersebut batal dikarenakan Perang Dunia II. Setelah perang usai, Tokyo sudah beberapa kali mengajukan diri ke IOC untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Olimpiade, namun masih saja gagal hingga akhirnya IOC menerima tawaran yang diajukan oleh Tokyo pada tahun 1955 untuk menjadi penyelenggara Olimpiade kedelapan belas pada tahun 1964 yang menandakan pertama kalinya Olimpiade diselenggarakan di Asia. Hingga saat ini Jepang telah tiga kali menyelenggarakan Olimpiade.¹² Jepang kembali mencalonkan diri untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2020 yang akan diselenggarakan di Tokyo. Dengan terpilihnya Tokyo sebagai kota penyelenggara Olimpiade 2020, hal ini berarti kali kedua bagi Tokyo dan kali keempat bagi Jepang menjadi penyelenggara ajang tersebut setelah Olimpiade 1964. Jepang ditunjuk oleh IOC sebagai tuan rumah Olimpiade 2020 pada tahun 2013 setelah perdana menteri Jepang berhasil meyakinkan IOC dalam pidatonya di Buenos Aires 7 September 2013.¹³ Tokyo berhasil mengalahkan suara Istanbul, Turki dan Madrid, Spanyol pada pemungutan suara di Pertemuan ke 125 IOC yang diadakan di Buenos Aires.

Untuk menyelenggarakan ajang *mega sport event*, tentunya membutuhkan persiapan yang matang, salah satunya dalam infrastruktur. Pembangunan berbagai infrastruktur penunjang untuk penyelenggaraan Olimpiade membutuhkan biaya yang

¹² Japan Fact Sheet, "Japan and the Olympics – Asia's First Olympic Host," <http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/18Olympics.pdf>, diakses 25 Januari 2019.

¹³ Japan Fact Sheet, diakses 25 Januari 2019.

tidak sedikit. Gambaran keuntungan yang akan didapatkan setelah menyelenggarakan *mega sport event* tersebut menjadikan negara penyelenggara tidak ragu untuk mengeluarkan dana yang besar. Namun hasil akhirnya tidak selalu seperti gambaran awal, hutang negara yang menumpuk membebani negara penyelenggara bahkan setelah bertahun-tahun ajang tersebut selesai diselenggarakan. Bent Flyvbjerg, PhD, dan Allison Stewart, MBA, keduanya di Saïd Business School, Oxford University, menyatakan bahwa "dalam Olimpiade, anggaran lebih seperti ukuran fiktif yang secara konsisten melebihi anggaran awal."¹⁴ Setiap kota tuan rumah bertanggung jawab atas kelebihan biaya ini, di samping anggaran awal mereka. Rata-rata kelebihan biaya untuk kota-kota tuan rumah dari tahun 1968 hingga 2010 adalah 252% untuk Olimpiade Musim Panas dan 135% untuk Musim Dingin, dengan Olimpiade Musim Panas 1976 Montreal mencapai yang paling banyak dengan 796%.¹⁵ Olimpiade Musim Panas pada tahun 1976 di Montreal melambangkan risiko fiskal dari penyelenggaraan Olimpiade. Proyeksi biaya \$ 124 juta adalah jauh di bawah biaya aktual sehingga membebani pembayar pajak kota hingga \$ 1,5 miliar untuk melunasi hutang yang membutuhkan waktu hampir tiga dekade. Montreal membutuhkan waktu hingga tahun 2006 untuk melunasi utangnya dari penyelenggaraan Olimpiade 1976.¹⁶ Selain kerugian yang dialami oleh Montreal, Olimpiade Athena 2004 yang berlangsung juga berakhir tidak seperti yang

¹⁴ Bent Flyvbjerg and Allison Stewart, "Olympic Proportions: Cost and Cost Overrun at the Olympics 1960-2012," [https://eureka.sbs.ox.ac.uk/4943/1/SSRN-id2382612_\(2\).pdf](https://eureka.sbs.ox.ac.uk/4943/1/SSRN-id2382612_(2).pdf), diakses 25 Mei 2019.

¹⁵ Bent Flyvbjerg and Allison Stewart, diakses 25 Mei 2019.

¹⁶ James Mc.Bride, "The Economics Hosting Olympic Games," Council on Foreign Relations, <https://www.cfr.org/background/economics-hosting-olympic-games>, diakses 25 Mei 2019.

diharapkan, penyelenggaraan Olimpiade ini memperburuk krisis keuangan Yunani 2007-2012 sehingga membawa negara Yunani menuju kebangkrutan.¹⁷

Berdasarkan fenomena di atas dimana hampir setiap negara mengalami perbedaan antara anggaran awal dan anggaran yang digunakan ketika acara tersebut berlangsung, sehingga banyak negara penyelenggara yang terlilit hutang beberapa dekade setelah penyelenggaraan seperti yang terjadi di Montreal bahkan hingga mengalami krisis ekonomi dan kebangkrutan pasca penyelenggaraan *mega sport event* tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat apa yang menjadi kepentingan Jepang sehingga tetap ingin menjadi negara penyelenggara Olimpiade 2020.

1.2.Rumusan Masalah

Banyak negara-negara yang berlomba untuk menjadi penyelenggara mega-sport event seperti Olimpiade. Bayangan keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang yang besar membuat suatu negara tidak ragu-ragu mengeluarkan dana yang besar bahkan dengan melakukan hutang sebagai modal awal untuk menyelenggarakan mega-sport event tersebut. Dalam menyelenggarakan pertandingan tersebut sering kali perencanaan anggaran awal tidak sesuai dengan anggaran yang digunakan ketika acara tersebut berlangsung. Tidak sedikit negara yang pada akhirnya terlilit hutang atau bahkan mengalami kebangkrutan pasca penyelenggaraan event tersebut. Seperti yang terjadi pada Montreal Kanada dan Yunani, namun Jepang tetap memutuskan untuk maju sebagai negara penyelenggara Olimpiade 2020. Selain itu

¹⁷ Nick Malkoutzis, "How the 2004 Olympics Triggered Greece's Decline," Bloomberg 3 Agustus 2012, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-08-02/how-the-2004-olympics-triggered-greeces-decline>, diakses 26 Mei 2019.

juga tantangan yang dihadapi Jepang untuk penyelenggaraan Olimpiade 2020 juga bertambah dengan kesuksesan Jepang dalam penyelenggaraan Olimpiade sebelumnya, terutama Olimpiade 1964 yang telah membawa perubahan yang signifikan terhadap Jepang dalam berbagai aspek, sehingga penulis ingin melihat kepentingan apa yang ingin dicapai oleh Jepang dengan menjadi negara penyelenggara Olimpiade pada tahun 2020 nanti.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan untuk penelitian ini adalah “Mengapa Jepang ingin menjadi negara penyelenggara Olimpiade 2020?”

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa alasan di balik keinginan Jepang menjadi negara penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020.

1.5. Manfaat Penelitian

Sebagai pengalaman penelitian bagi penulis dan juga menjadi referensi dalam kajian ilmu Hubungan Internasional serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian berikutnya.

1.6. Studi Pustaka

Telah banyak penelitian mengenai hubungan olahraga dan Hubungan Internasional. Dalam studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penelitian-penelitian terdahulu dan akan dijadikan perbandingan dengan

penelitian ini. Secara umum banyak bacaan yang berupa karya-karya ilmiah yang berbentuk buku, jurnal dan tugas akhir.

Pertama jurnal yang ditulis oleh Airton Saboya Valente dan Joan Noguera Tur yang membahas mengenai penyelenggaraan even olahraga internasional dapat memberikan efek yang besar dengan datangnya para penonton dan peserta dari berbagai Negara, memiliki daya tarik bagi media dan juga merupakan investasi besar dalam infrastruktur, logistic dan keamanan bagi penyelenggara.¹⁸ Dengan menjadi penyelenggara suatu even olahraga internasional, dapat memberikan negara penyelenggara kesempatan untuk menunjukkan budaya dan sosialnya serta kapabilitas politik dan ekonomi yang dimilikinya kepada dunia.

Di dalam tulisannya, penulis melihat penyelenggaraan Piala Dunia 2010 yang diselenggarakan oleh Brazil telah membangun dan juga memodernisasi infrastruktur dan layanan publik di Brazil. Pariwisata di Brazil pun meningkat seiring makin percayanya para investor untuk menanamkan investasi di Brazil. Brazil menghabiskan dana sebanyak US \$ 15 miliar untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2010 yang digunakan untuk mengembangkan kota penyelenggara, modernisasi infrastruktur, fasilitas umum dan transportasi, meningkatkan layanan publik serta membangun dan meningkatkan fasilitas olahraga. Sektor konstruksi, logistik, pariwisata, perhotelan dan pelayanan bisnis merupakan sektor yang mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan Piala Dunia 2010 di Brazil. Selain itu Piala Dunia

18 Airton Saboya Valente Junior & Joan Noguera Tur, "Mega Sporting Events and Legacy: The Case 2010 of the World Cup," The Institute of Local Development, Universidad de Valencia, (2014): 105

2010 akan meninggalkan berbagai jenis warisan fisik, sosial, ekonomi, kelembagaan dan *brand* jika warga Brazil mampu memanfaatkan warisan tersebut.

Dari penelitian tersebut peneliti melihat dampak yang ditimbulkan oleh negara penyelenggara *mega-sport event*. Banyak keuntungan yang didapatkan oleh negara penyelenggara. Namun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dimana penelitian tersebut meneliti akibat penyelenggaraan *mega sport event* pasca diselenggarakannya *event* tersebut, sementara dalam penelitian ini - peneliti meneliti melihat alasan apa yang membuat Jepang ingin menyelenggarakan *mega-sport event* tersebut.

Kedua, David Black menulis di dalam Jurnalnya yang berjudul *The Symbolic Politics of Sport Mega-Events: 2010 in Comparative Perspective* yang menulis bahwa negara penyelenggara akan mendapatkan banyak keuntungan dari penyelenggaraan even olahraga internasional.¹⁹ Black lebih menekankan kepada keuntungan ekonomi dan pembangunan, termasuk investasi infrastruktur dan kesempatan promosi diri dengan tujuan untuk memperluas investasi, pariwisata, dan juga kemampuan untuk menarik acara serupa di masa yang akan datang. *Mega sport event* telah menjadi cara untuk mengartikulasikan pesan kunci negara penyelenggara. Terlebih lagi juga terlihat pada bentuk acara utama seperti upacara pembukaan dan penutupan, yang merupakan kesempatan bagi negara tuan rumah untuk memproyeksikan gambaran menarik mengenai negaranya. Black juga mengatakan

19 David Black, "The Symbolic Politics of Sport Mega-Events: 2010 in Comperative Perspective," *Politicon: South Africa Journal of Political Studies* vol.34 no.3, (2007): 261-276.

bahwa setiap negara memiliki kerentanan identitas dan ekonomi-politik, serta saling bersaing dalam dunia global dan kemudian melihat bahwa penyelenggaraan sebuah kompetisi olahraga internasional sebagai kesempatan untuk menghadapi kerentanan dan kebutuhan ini di antara berbagai alternatif lainnya. Dapat dilihat terdapat kedekatan antara penelitian ini dan penelitian di atas, namun berbeda dari segi konsep yang digunakan dan juga objek yang diteliti.

Ketiga, jurnal yang berjudul *Assesing the Impact of Sports Mega Events in Transition Economies: EURO 2012 in Poland and Ukraine* membahas bagaimana penyelenggaraan *UEFA Championship* memberikan dampak yang signifikan bagi negara penyelenggara. Banyaknya orang yang masuk ke negara Polandia dan Ukraina tentunya memberikan keuntungan ekonomi bagi negara tersebut. Selain itu infrastruktur dan pelayanan publik di negara penyelenggara bahkan setelah usainya even tersebut juga menjadi semakin baik.

Keempat, skripsi Abdul Rahim Sazli menjelaskan mengenai kepentingan nasional Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Pengalaman Indonesia dalam menyelenggarakan *mega sport event* sebelumnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam segi ekonomi. Sehingga muncul pertanyaan motif apa yang melatarbelakangi keputusan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Penelitian ini menjelaskan kepentingan nasional Indonesia menggunakan konsep *state behavior* dengan empat indikator pendorong dalam pembuatan kebijakan yaitu *interests, threats, opportunities, dan capabilities*. Faktor kepentingan - dominan dalam memengaruhi keputusan Indonesia untuk menjadi penyelenggara Asian Games

2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik eksplanatif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan pencitraan dan investasi adalah tujuan Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah berbeda dari hal tingkatan pertandingannya, dimana pada skripsi sebelumnya membahas mengenai Asian Games 2018 sedangkan pada penelitian ini penulis akan melihat Olimpiade Tokyo 2020, dan juga dari segi aktornya pun berbeda dimana dalam skripsi ini aktornya adalah Jepang yang merupakan negara maju di Asia sedangkan pada skripsi sebelumnya aktornya adalah Indonesia yang merupakan Negara berkembang.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Razif Azhari²⁰ menjelaskan mengenai cara Indonesia memanfaatkan penyelenggaraan even olahraga internasional seperti SEA Games 2011 sebagai sarana pencapaian *national interest* yang mencakup pemanfaatan secara politik, ekonomi dan budaya. Pemanfaatan secara politik dapat dilihat dengan kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan SEA Games 2011 dalam meningkatkan citra Indonesia yang sebelumnya buruk karena isu keamanan di Indonesia. Dengan berhasilnya menyelenggarakan even internasional merupakan salah satu instrumen kematangan politik dalam negeri Indonesia. Di bidang ekonomi Indonesia mendapatkan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pada November dan Desember 2011 dengan peningkatan mencapai masing-masing 13,28% dan 12,47% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang

20 Razif Azhari, "SEA Games 2011 Sebagai Sarana Sport Diplomacy Indonesia," Universitas Andalas, Padang, (2014): 2.

sama.²¹ Dengan meningkatnya kunjungan para wisatawan ke Indonesia juga dimanfaatkan sebagai promosi pariwisata di Indonesia dan menjadi daya tarik bagi investor. Kemudian pemanfaatan budaya yang dilakukan Indonesia yaitu memunculkan nasionalisme, kebanggaan, rasa percaya diri dan patriotisme bagi masyarakat Indonesia. Kesempatan sebagai penyelenggara even olahraga internasional menunjukkan pada dunia bahwa negara tersebut sudah maju di bidang sosial. Dari penelitian tersebut dapat dilihat terdapat kedekatan terhadap apa yang diteliti dengan penelitian ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitian maupun konsep yang digunakan dimana penelitian tersebut membahas mengenai manfaat yang diperoleh negara setelah penyelenggaraan sebuah even olahraga internasional. Sedangkan penelitian ini akan mencari tahu apa yang menjadi motif negara dalam menjadi tuan rumah sebuah even olahraga internasional.

1.7. Kerangka Konseptual

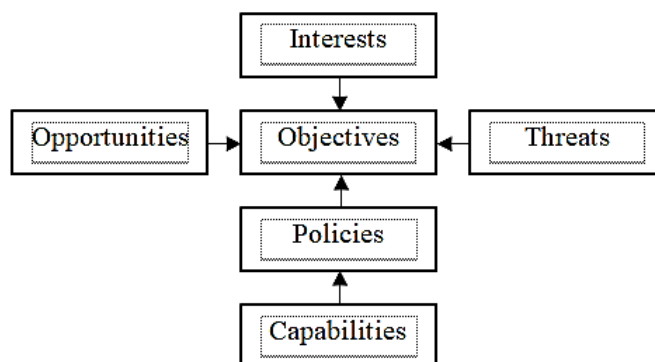
1.7.1. State Behaviour

Untuk mengkaji kepentingan Jepang dalam Tokyo 2020, maka penulis merujuk pada tulisan yang dipaparkan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi yang menjelaskan bahwa beberapa faktor menjadi pendorong Negara dalam membuat kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuan nasional yaitu *opportunities, interests, threats, dan capabilities*.²²

21 Razif Azhari, 2.

22 Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "International Relations and World Politics", Fifth Edition, Pearson, USA, (2013): 187.

Secara sederhana dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.1. Bagan *State Behaviour*

Sumber :Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics*, Fifth Edition, Pearson, USA, 2012, hal 187.

Dengan kerangka pemikiran ini maka dalam setiap proses pembuatan kebijakan terlebih dahulu akan memperhatikan faktor peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Kemudian dengan mengkombinasikan kepentingan nasional (*interests*) dan kapabilitas (*capabilities*) yang dimiliki, maka sebagai hasil adalah kebijakan (*policies*). Secara umum *interests* atau kepentingan nasional negara merupakan panduan bagi negara untuk menentukan kebijakan, namun kemudian dibutuhkan yang lebih spesifik lagi. Kepentingan yang lebih spesifik inilah yang disebut dengan *objectivitas*, yang akan dicapai melalui kebijakan setelah mempertimbangkan faktor peluang, tantangan, kepentingan nasional dan kapabilitas dalam proses pembuatan kebijakan sebelumnya.²³

²³ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 188.

Pemahaman keempat faktor tersebut dapat diaplikasikan dalam pembuatan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan tersebut. Dalam sistem global, *opportunities* apabila dimanfaatkan akan menjadi faktor pendorong dalam mencapai tujuan nasional. Di satu sisi *threats* juga mampu mengintervensi tujuan nasional. Jadi untuk memanfaatkan *opportunities* dan menangani *threats* maka dibutuhkan kebijakan yang menggunakan semua elemen kekuatan nasional. Negara kemudian memobilisasi *capabilities* dan melihat *opportunities* untuk menggunakan power secara konstruktif untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingan nasional.

1. *Interests*

Tidak ada perdebatan bahwasanya kepentingan nasional yang paling utama adalah bertahannya negara dalam dinamika internasional.²⁴ Kelangsungan negara tersebut menyiratkan bahwa penting untuk menjaga kedaulatan negara (*sovereignty*). Kedaulatan adalah yang diklaim oleh negara baik itu kedaulatan kedalam (yurisdiksi negara, politik dalam negeri, maupun otoritas pemerintah) maupun kedaulatan terluar yang tercermin dalam kemandirian dalam menjalankan politik luar negeri. Kepentingan Negara berikutnya adalah ekonomi dan kesejahteraan untuk rakyat. Namun kepentingan ekonomi tidak hanya dicapai atas nama rakyat namun juga menjadi sumber daya yang penting dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional yang terakhir adalah kepentingan dalam mempertahankan nilai-nilai negara seperti negara-negara Barat yang menjadikan demokrasi sebagai identitas nasional yang tidak hanya dipertahankan namun juga disebarluarkan.

²⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 187.

2. *Threats*

Dalam pencapaian sebuah objektivitas nasional, tekanan dalam sistem global dapat memengaruhi perumusan pencapaian objektivitas negara.²⁵ Jika sebuah negara memiliki niat untuk melakukan tindakan membahayakan negara lain tetapi tidak memiliki kemampuan, maka ancaman rendah. Demikian pula jika negara mungkin memiliki kemampuan, tetapi tidak ada niat negara tersebut melakukan tindakan membahayakan, maka ancaman juga rendah. Selain itu ancaman dapat dilihat dari ancaman langsung dan ancaman tidak langsung dari luar maupun dari dalam.

3. *Opportunities*

Selain bisa menjadi ancaman, sistem global juga bisa menjadi peluang yang memengaruhi pembuatan keputusan negara dalam pencapaian kepentingan nasional.²⁶ Peluang tersebut dimanfaatkan negara seperti ekspansi pasar ekonomi dan investasi luar negeri. Beberapa contoh seperti keputusan China untuk membentuk zona perdagangan luar negeri di provinsi pesisir timur pada tahun 1980-an memberikan kesempatan bagi negara-negara lain untuk memperluas perdagangan dan investasi ekonomi di negara padat penduduk tersebut. Perang bahkan dijadikan juga kesempatan untuk menata ulang sistem internasional, seperti Pasca Perang Dunia II dengan pihak sekutu sebagai pemenang yang kemudian memimpin dunia ke arah perdagangan dan investasi internasional serta menciptakan organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF.

25 Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 188.

26 Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 192.

4. *Capabilities*

Dalam pembentukan objektivitas tersebut, tidak hanya mempertimbangkan ketiga faktor di atas, namun juga akan mempertimbangkan faktor kemampuan negara. Bahkan dalam beberapa kasus justru faktor kemampuan dan kekuasaan negara yang mendorong terciptanya keputusan.²⁷ Jika dijelaskan secara ringkas peluang mempunyai peran spesifik dalam mencapai tujuan nasional. Sama halnya dengan ancaman, kedua hal ini berasal dari sistem global yang memiliki kontribusi dalam pencapaian tujuan, namun untuk memanfaatkan peluang dan menangani ancaman - negara harus mengerahkan segala kemampuannya sebagai alat penyelesaian. Kemampuan yang dimiliki negara ini berguna untuk memanfaatkan *power* guna mendapatkan tujuan dan melindungi kepentingan mereka.

Kemudian Paull R. Viotti dan Mark V. Kauppi menyebutkan ada sekurang-kurangnya empat kategori kapabilitas nasional suatu negara yaitu (1) kapabilitas politik, (2) kapabilitas sosial dan budaya, (3) kapabilitas yang berkaitan dengan geografi, ekonomi dan teknologi, (4) serta kapabilitas militer.²⁸ Kapabilitas politik adalah sumberdaya manusia, teknologi komunikasi, reputasi atau citra suatu negara di mata internasional, dan hakekat budaya politik dan sistem politiknya. Kapabilitas sosial dan budaya suatu masyarakat terdiri dari tingkat kohesi sosialnya, tingkat pendidikan, system nilai yang dianut, etos kerja dan sikap positifnya terhadap kemajuan, selanjutnya ada faktor geografi, ekonomi yang biasanya diukur dengan

²⁷ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 200.

²⁸ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 202.

GNP (*Gross National Product*) dan penguasaan teknologi khususnya teknologi yang memberikan nilai tambah atau *value added* yang tinggi kepada komoditi eksportnya. Kapabilitas militer sebagai unsur kapabilitas nasional terdiri dari kemampuan senjata konvensional dan senjata nuklir. pemilikan senjata nuklir meningkatkan *political leverage* atau pengaruh politik suatu negara dalam kebijakan luar negeri sehingga diperhitungkan oleh negara-negara lain.

Terkait penyelenggaraan Tokyo 2020, peneliti melihat bahwa negara, dalam hal ini yaitu Jepang, sebelum memutuskan untuk menjadi penyelenggara terlebih dahulu memahami empat faktor tersebut di atas yaitu kepentingan nasional, tantangan, peluang dan kapabilitas. Peneliti mendapatkan setelah kalkulasi keempat faktor tersebut hasil yang diperoleh yaitu faktor tantangan tidak lebih besar daripada ketiga faktor lainnya, sehingga kebijakan dibuat bahwa Jepang maju menjadi tuan rumah Tokyo 2020 dengan objektivitas tertentu yang akan peneliti analisa di bab selanjutnya.

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara serta memahami perilaku internasional. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan pada pembuatan keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Padelford dan Lincoln mengidentifikasi kepentingan

nasional berupa kepentingan pengembangan ekonomi, kepentingan peningkatan kekuatan nasional, dan kepentingan prestise atau citra nasional.²⁹

Dalam pencapaian kepentingan nasional juga dapat dilihat bagaimana negara menjalankan kebijakan luar negeri. Karena kebijakan luar negeri merupakan suatu upaya negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan ekseternalnya.³⁰ Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan proses di mana tujuan negara atau kepentingan nasional hendak disusun dan dicapai. Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi membedakan tujuan kebijakan luar negeri jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang³¹ yang menyangkut tiga isu penting dalam politik global yaitu keamanan, ekonomi dan identitas. Dalam table berikut keduanya memberikan contoh kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan tiga isu tersebut berdasarkan rentang waktu yang dicakupnya.

29 Norman J. Padelford dan George A. Lincoln, "The Dynamic of International Politic," The Macmillan Company, New York: 381

30 Anak Agung Banyu Prawita, "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional," PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, (2005): 40.

31 Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "International Relations and World Politics", Fifth Edition, Pearson, USA, (2012):189.

Isu	Jangka Pendek (Tingkat pentingnya bervariasi, sering urgensinya tinggi)	Jangka Menengah (Tidak mendesak tapi tetap penting)	Jangka Panjang (Tidak mendesak, tetapi nilai pentingnya lebih tinggi)
Perang (Keamanan)	Merundingkan gencatan senjata; memisahkan pihak-pihak yang bertikai	Mempertahankan fungsi perjuangan perdamaian yang efektif; mengelola konflik yang tak terselesaikan dan mencegah eskalasi kekerasan	Mencapai perdamaian yang langgeng; menyelesaikan konflik dan rekonsiliasi.
Perdagangan (Ekonomi)	Mengajak pihak yang lain untuk memberikan konsensi dalam perdagangan berupa penurunan tarif atau hambatan perdagangan lainnya.	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perluasan hubungan perdagangan.	Menjamin tatanan perdagangan yang bebas secara global.
HAM (<i>values</i>)	Membebaskan tahanan politik, menghentikan pelanggaran HAM di suatu negara.	Membangun dan mengembangkan Irgitimasi HAM	Mencapai kondisi sosial dan politik yang demokratis.

Tabel 1.1. Tujuan Kebijakan Luar Negri

Sumber : Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics, Fifth Edition*, Pearson, USA, 2012

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang menggali dan memahami makna yang dianggap oleh sekelompok orang

atau sejumlah individu sebagai asal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan.³² Proses penelitian tersebut melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data secara spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang di dapat.³³ Dalam penelitian ini lebih mencirikan analisis kualitatif yang menggambarkan kepentingan Jepang dalam penyelenggaraan Tokyo 2020. Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).³⁴ Penelitian yang bersifat kualitatif dengan model deskriptif-analisis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang telah maupun yang sedang terjadi dengan menggunakan data yang deskriptif berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel agar dapat lebih memahami secara mendalam mengenai kejadian yang berhubungan dengan focus masalah yang diteliti.³⁵ Jenis metodologi ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang penulis teliti, serta dapat menghubungkannya dengan konsep yang dipakai.

32 John W. Creswell, "Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition," California, SAGE Publikation, (2013): 4.

33 John W. Creswell, 4.

34 Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif," Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, dikutip dari skripsi Abdul Rahim Sazli , "Analisis Kepentingan Indonesia dalam Penyelenggaraan Asian Games 2018," Universitas Andalas, (2016): 20.

35 Dr. Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung, (2000).

1.8.2. Batasan Penelitian

Objek pokok penelitian ini adalahh Tokyo 2020 yang akan datang, dalam penelitian ini penulis membatasi pada analisis temuan-temuan yang diperoleh terkait penyelenggaraan Tokyo 2020 di Jepang mulai dari proses awal pencalonan Jepang sebagai penyelenggara sampai saat penelitian ini dilaksanakan, yaitu rentang waktu 2013-2019, sehingga penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan yaitu motif kepentingan Jepang sebagai penyelenggara Tokyo 2020.

1.8.3. Unit Analisa dan Tingkat Analisa

Dalam menentukan tingkat analisa, hendaklah terlebih dahulu kita menentukan unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa yaitu objek yang perilakunya hendak kita analisa dan jelaskan, dan unit eksplanasi adalah objek yang memengaruhi perilaku unit analisa yang digunakan.³⁶ Unit analisa dalam penelitian ini adalah negara dan unit eksplanasi adalah alasan penyelenggaraan Tokyo 2020. Ini menjadikan level analisis penelitian ini adalah negara bangsa.

1.8.4. Teknik Pengumpulan

Penelitian ini berlandaskan pada sumber sekunder (*secondary source*) yang merupakan suatu dokumen yang ditulis melalui hasil penelitian terkait suatu kejadian tersebut secara langsung. Dokumen-dokumen ini tidak memiliki hubungan langsung dengan kejadian atau orang-orang yang diteliti. Dalam pengumpulan data, untuk

36 Mohtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES,1990). Hal. 35.

penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber-sumber informasi berupa data-data yang mendukung dan dianggap relevan.

Data adalah sesuatu yang didapat oleh suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis sehingga akan menghasilkan suatu hasil penelitian yang menggambarkan dan mengindikasikan sesuatu. Data-data yang dimuat merupakan data yang berkaitan dengan bidang kajian yang diteliti yaitu terkait negara, *foreign policy*, kepentingan nasional dalam penyelenggaraan *mega sport event*, data mengenai *Olympic Games*, proses pencalonan Jepang hingga penetapan sebagai penyelenggara sampai pada persiapan Jepang sebagai penyelenggara Tokyo 2020, baik berupa literatur, penelitian terdahulu, buku, majalah dokumen, arsip maupun media tertulis lainnya. Data yang terkumpul kemudian akan diolah untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

1.8.5. Analisis Data

Untuk menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan, peneliti akan memilih data secara berurutan sesuai dengan tempat, waktu, ruang kejadian dan juga terbentuknya kejadian. Data primer dan sekunder yang didapat akan dicatat dan kemudian dengan pengetahuan dari studi pustaka serta kerangka konsep data tersebut akan dicek untuk kemudian disusun menjadi sebuah pemahaman. Pemahaman tersebut yang akan ditafsirkan, dimaknai, dijelaskan dan digambarkan dalam penelitian sesuai dengan alur, sebab dan konteks yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan pengetahuan yang peneliti pelajari.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian konsep-konsep, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Olahraga Sebagai Instrumen dalam Pencapaian Kepentingan Nasional Jepang

Pada bagian ini berisi mengenai bagaimana kegiatan olahraga yang merupakan *mega sport event* menjadi salah satu instrument *power* dalam kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional Jepang.

BAB III : Persiapan Penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020

Bab ini akan menguraikan mengenai Olimpiade secara umum mulai dari sejarah Olimpiade dan gambaran pelaksanaan even terdahulu. Serta menggambarkan Jepang sebagai penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 mulai dari proses pencalonan sampai penetapan sebagai penyelenggara hingga persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Olimpiade 2020. Bagian ini juga akan menjelaskan mengenai apa saja tantangan dan kapabilitas serta peluang yang dimiliki oleh Jepang.

BAB IV : Analisis Kepentingan Jepang dalam Penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020

Bab ini berisi tentang analisis kepentingan Jepang dalam penyelenggaraan Tokyo 2020. Pada bab ini penulis akan menghubungkan temuan data dengan konsep yang digunakan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi ringkasan dari keseluruhan pembahasan dan hasil penelitian, rumusan penulisan dan juga saran.

